

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN**
(Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat)

ARTIKEL



OLEH:
INDRA KURNIA
BP: 2005/67596

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat)

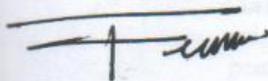
Oleh :

INDRA KURNIA
67596

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

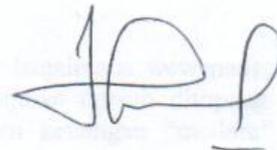
Padang, Maret 2013

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat)

Oleh: Indra Kurnia

Abstrak

Akuntansi keuangan daerah dan aparatur pemerintah sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Bagaimana dengan di Propinsi Sumatera Barat? Sejauhmana akuntansi keuangan daerah dan aparatur pemerintah di Propinsi Sumatera Barat mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah? Penelitian ini termasuk penelitian kausatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas aparatur pemerintah dan akuntabilitas keuangan

Abstract

Region of financial accounting and government officials strongly influence the financial accountability. What about in West Sumatra Province? Extent of the region of financial accounting and government officials in the province of West Sumatra affected area of financial accountability? This research including to causative research because aiming to determine the relationship between the variables studied. Results of data analysis indicate that: (1) The application region financial accounting systems a positive significant effect on financial accountability of West Sumatra province, and (2) Quality of government officials a positive significant effect on the financial accountability of the area of West Sumatra province.

Keyword : Region financial accounting systems, quality of government officials, and financial accountability

I. Latar Belakang

Dewasa ini, belum sepenuhnya aparatur pemerintah daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 17 tahun 2007 yang

mengatur bagaimana wewenang, hak, dan kewajiban daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern” dan penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Akibatnya, pengelolaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, pengawasan oleh Badan Pengawas provinsi/kabupaten/kota belum optimal sehingga sering dijumpai temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang dan lambat ditindaklanjuti (BPK, 2009).

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat

dikembangkan untuk tujuan khusus (Boedi Prihandono, 2009:12).

Selain sistem akuntansi keuangan daerah, keberadaan sumber daya manusia/SDM (dalam hal ini aparatur pemerintah daerah) juga mempengaruhi peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, karena dengan adanya aparatur pemerintah yang baik maka penyampaian laporan keuangan akan menjadi baik pula. Apalagi jika ditunjang dengan adanya kemampuan yang sangat memadai yang dimiliki aparatur pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan.

Covey, Roger, dan Rebecca Merrill (1994) dalam Sedarmayanti (2004) menyatakan bahwa SDM yang berkualitas hendaknya memiliki kompetensi teknis dimana SDM harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan, dan mencari alternatif baru. Kemampuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati merupakan suatu cara dalam peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dijelaskan bahwa sumber daya aparatur pemerintah mempengaruhi peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya aparatur pemerintah seharusnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, fenomena yang terjadi, khususnya di Propinsi Sumatera Barat, memperlihatkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah masih harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya

laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota di Sumatera Barat, yang tidak/belum tepat sasaran.

Selain itu, fenomena yang terjadi dalam beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya, antara lain: tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran, pengukuran kinerja Instansi Pemerintah lebih menekankan kepada kemampuan Instansi Pemerintah dalam menyerap anggaran, hingga pengawasan fungsional yang masih belum efektif karena belum dilaksanakan secara profesional. Selain itu, fenomena yang terlihat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan di beberapa kota/kabupaten pada Tahun Anggaran 2009 menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang material. Temuan BPK RI ini dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 50B/S/XIV.11-XIV.11.2/06/2010 tanggal 4 Juni 2010. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Berpijak dari hal ini, permasalahan

yang dikaji adalah: 1) apakah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan? Dan 2) apakah kualitas aparatur pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan?

II. Landasan Teori

Akuntabilitas Keuangan

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Mohamad (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai

jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry* atau asimetri informasi. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah

Mulyadi (2001:163) mengatakan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern. Sedangkan Gillespie (1985:188) menyatakan bahwa "*internal checks are "measure and methods" built into an accounting system to check the accuracy of accounting and safeguard the assets of the company*". Sistem akuntansi disusun dengan maksud untuk: (1) *Cost effective*; (2) *useful output*; dan (3) *internal control* (Weygant, 2005:85; Warren, 2005:80).

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat, sistem akuntansi keuangan daerah yang dibentuk harus memiliki komponen sistem pengendalian intern sehingga apabila suatu sistem akuntansi keuangan daerah telah mencakup komponen tersebut akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Herbert (1984:3) menegaskan pada organisasi pemerintah terdapat dua orientasi atau kepentingan yang diperankan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu orientasi laba dan bukan laba. Orientasi laba pada pemerintah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, pengelola administrasi pemerintahan perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi, dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Hal senada ditegaskan

oleh Collier (1997:7) bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.

Kualitas Aparatur Pemerintah

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang harus dilihat dalam sebuah instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai. Menurut Martoyo (2002), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya.

Manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi

untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat, hal ini memberikan keyakinan bahwasanya SDM dalam suatu organisasi hendaknya memiliki kemampuan yang baik dalam bidangnya masing-masing sehingga pencapaian kinerja akan menjadi baik dalam hal ini juga akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah sebagai variabel independen dengan akuntabilitas keuangan pada inspektorat Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten dan Kota Sumatera Barat dengan jumlah karyawan/pegawai seluruhnya mencapai 357 orang. Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan *teknik random sampling* dari populasi. Untuk itu dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 8 inspektorat yang ada di Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat, yaitu Inspektorat Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, dan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Kuesioner didistribusikan ke seluruh Inspektorat masing-masing kabupaten/kota wilayah propinsi Sumatera Barat.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Variabel Independen (X), yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah, 2) Variabel Dependen (Y), yaitu Akuntabilitas Keuangan daerah (Y).

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Indikator yang digunakan untuk menentukan data variabel bebas X_1 dan X_2 diambil dari beberapa pendapat ahli seperti yang terdapat pada kajian

teoritis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Angket dalam penelitian ini berbentuk skala bertingkat (Skala Likert) dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor. Untuk pernyataan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah alternatif jawabannya adalah : SL= Selalu, SR = Sering, KK= Kadang-kadang, P = Pernah, TP = Tidak Pernah. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing alternatif jawaban dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat

Pernyataan Sikap	Positif	Negatif
Selalu (SL)	5	1
Sering (SR)	4	2
Kadang-Kadang (K)	3	3
Pernah (P)	2	4
Tidak Pernah (TP)	1	5

Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan reabilitas (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Dengan kriteria untuk mengukur

reliabilitas adalah sebagai berikut: 1) Jika r alpha kurang dari 0.6 maka dikatakan tidak reliabel, 2) Jika r alpha 0.6 - 0.7 maka dikatakan akseptabel, 3) Jika r alpha 0.7 - 0.8 maka dikatakan baik, dan 4) Jika r alpha lebih dari 0.8 maka dikatakan reliabel

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif
 - a. Verifikasi Data
 - b. Menghitung Nilai Jawaban
 - 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas item pertanyaan yang diajukan.
 - 2) Menghitung rata-rata skor total item.
 - 3) Menghitung nilai rata-rata jawaban responden
 - 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik.
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi

berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Akuntabilitas Keuangan
 A : Konstanta
 $b_{1,2}$: Koefisien regresi dari variabel independen
 x_1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 x_2 : Kualitas Aparatur Pemerintah
 E : Error

b. Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

- R^2 : koefisien determinasi
 n : jumlah variabel
 k : jumlah variabel bebas

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu

variabel bebas, maka untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan *Adjusted R²*.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $\text{sig} > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis 95% atau (α) = 0,05.

d. Uji hipotesis (Uji t)

Dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

Keterangan :

- t : Nilai mutlak pengujian
 - β_n : Koefisien regresi masing-masing variabel
 - $S\beta_n$: Koefisien *error* masing-masing variabel
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $\alpha < 0,05$ dan koefisien (β) positif maka H_a diterima, dan H_o ditolak.

IV. Temuan Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

1. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inspektorat di Sumatera Barat telah melakukan pengeluaran belanja melebihi pagu belanja yang dianggarkan dalam

APBD. Selain itu, semua pengeluaran atas beban anggaran daerah yang dikeluarkan masih ada yang belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. Bahkan masih belum banyak penyajian dalam situs resmi pemerintah tentang pembebanan pengeluaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari 225 responden pada SKPD Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD Propinsi Sumatera Barat dengan tingkat capaian rata-rata 65,92% yang dapat dikatakan cukup baik.

2. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah (X_2)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SKPD mau mencari informasi dan menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar dan pelatihan. Selain itu, SKPD dan perangkatnya belum banyak melakukan perbaikan apabila menemukan kesalahan dalam pekerjaan.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pada SKPD Propinsi Sumatera Barat yang diteliti, kualitas aparatur pemerintah pada SKPD Propinsi Sumatera Barat dengan tingkat capaian rata-rata 65,54% sehingga dapat dikatakan cukup baik.

3. Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SKPD menyampaikan pertanggungjawaban laporan

realisasi anggaran secara tepat waktu. Selain itu, selama ini masih belum banyak dilakukan pengungkapan sebab-sebab perbedaan antara anggaran dan realisasinya.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden menyatakan akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Propinsi Sumatera Barat dengan tingkat capaian rata-rata 64,94% sehingga dapat dikatakan cukup baik.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Hipotesis pertama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai $t = 1,765$ dan nilai signifikan $0,005$. Pengaruh antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan daerah adalah bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Amien (2010) bahwa “transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan di atas, hal ini terjadi dikarenakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan akuntabilitas keuangan daerah dilakukan dengan menerapkan system akuntansi keuangan daerah yang cukup tepat.

Adapun implikasi yang diharapkan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Propinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala SKPD) di Propinsi Sumatera Barat, di mana para kepala SKPD ini menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
- b. Pimpinan SKPD di Propinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Pimpinan SKPD di Propinsi Sumatera Barat dapat memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan

menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.

- d. Pimpinan SKPD di Propinsi Sumatera Barat dapat memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah adalah penerapan system akuntansi keuangan daerah secara baik dan menyusunya dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Hasil penelitian dan implikasi di atas juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrinaldo (2010) yang menemukan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dilihat dari distribusi frekuensi, sistem pengendalian intern pemerintah telah terlaksana dengan baik, dibuktikan dari nilai rerata TCR sebesar 65,92%. Dalam kenyataannya, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan daerah masih belum memadai, walaupun dalam tabel distribusi frekuensi pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan cukup baik.

Saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik, maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat. Hal ini didasarkan pada tujuan

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, pengamanan aset negara, dan keandalan laporan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Dari semua pernyataan di atas menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan keadaan yang terjadi pada saat ini dimana penerapan akuntansi keuangan daerah dikategorikan baik tapi masih adanya kelemahan yang mesti harus diperbaiki.

2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan nilai $t = 7,077$ dan nilai signifikan 0,000. Pengaruh antara kualitas aparatur pemerintah dengan akuntabilitas keuangan daerah adalah bahwa semakin baik kualitas aparatur pemerintah maka semakin terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Prihandono (2009) menyatakan bahwa “tanpa SDM yang berkualitas, pemerintahan tidak akan berjalan sesuai keinginan dan harapan menuju sebuah target tujuan. Peran SDM mutlak sangat

krusial, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan dalam tubuh pemerintah”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan di atas, hal ini terjadi dikarenakan akuntabilitas keuangan daerah ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah yang cukup kompeten dalam bidangnya dan cukup berkualitas sehingga akuntabilitas keuangan daerah dapat terjaga.

Adapun implikasi yang diharapkan dari kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah aparatur pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Barat dapat melakukan tugas dalam hal keuangan daerah dengan professional, baik, transparan, dan terbuka sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang efektif tergantung kepada kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban.

Dilihat dari distribusi frekuensi, kualitas aparatur pemerintah telah terlaksana dengan cukup baik, dibuktikan dari nilai rerata TCR sebesar 65,55%. Namun, item pertanyaan kuesioner semuanya masih

berkategori cukup, hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari setiap Pimpinan SKPD.

Dalam temuan lapangan, kualitas aparatur pemerintah dalam menghasilkan akuntabilitas keuangan daerah masih belum sepenuhnya terwujud, walaupun dalam tabel distribusi frekuensi pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan cukup baik.

V. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat.
2. Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, M. Paul. 1997. *The Power of Accounting; A Field Study of Local Financial Management in a Police Force*. Aston Business Scholl Research Institute.
- Herbert, 1984. *Region Financial Accounting System*. Canada: Fraser Institute Digital Publication.
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Gajah Mada

- Mohamad, Ismail dkk. 2004. "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". (Online) dalam <http://www.lan.go.id> diakses tanggal 1 Juni 2011.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prihandono, Boedi. 2009. "Transparansi turut mendorong peningkatan akuntabilitas pengawasan". *Jurnal transparansi*. Vol 4 No. 1. Jakarta
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik Membangun Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance)*, Bandung: Mandar Maju
- Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., 1999, *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila.
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. "Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration". UN DESA. (Online) dalam <http://www.unpan.org> diakses tanggal 11 juni 2011..

LAMPIRAN

Tabel 1
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item	Acuan
1	SAKD (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah. Situs adalah suatu daerah lokasi jelajah pada internet, diidentifikasi dengan suatu alamat yang unik 3. Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional. 	<p>1,2,3,4,5</p> <p>6,7,8,9</p> <p>10,11</p>	Indra (2006)
2	Kualitas Aparatur Pemerintah (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai intelektual dan artistik. 2. Ketertarikan pada kompleksitas. 3. Kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian. 4. Ketekunan. 5. Pemikiran yang mandiri. 6. Toleransi terhadap ambiguitas. 7. Otonom. 8. Kepercayaan diri. 9. Kesiapan mengambil resiko. 	<p>1,2</p> <p>3,4</p> <p>5,6,7</p> <p>8,9</p> <p>10</p> <p>11,12</p> <p>13</p> <p>14</p>	Sedarmayanti (2004)

3.	Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	1. Akuntabilitas kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD	1,2,3	Mardiasmo (2006) dalam Sari (2009)
		2. Akuntabilitas program yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah	4,5,6	
		3. Akuntabilitas proses yang mengalokasikan dana yang ada dalam APBD	7,8,9	
		4. Akuntabilitas hukum dan peradilan dalam penggunaan dana publik	10,11,12,13	

Lampiran Hasil Pengujian Data Penelitian

1. Uji Valid Penelitian

Variabel X1

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	225	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	225	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.721	.704	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	3.9839	.75730	225
Q2	3.5323	.78339	225
Q3	3.8065	.90243	225
Q4	4.2419	.73964	225
Q5	4.1774	.73605	225
Q6	3.9032	.82402	225
Q7	3.7903	.90784	225
Q8	4.0484	.77729	225
Q9	4.1129	.70373	225
Q10	4.1452	.59635	225
Q11	4.1290	.71251	225

Inter-Item Correlation Matr

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Q1	1.000	.098	.283	.300	-.024	.654	-.053	.698	.003	-.067	-.057
Q2	.098	1.000	.125	.170	.033	.487	.459	.038	-.022	-.133	.022
Q3	.283	.125	1.000	.170	-.046	.151	.310	.014	.087	-.130	-.088
Q4	.300	.170	.170	1.000	.251	.389	.126	.350	.104	-.192	.189
Q5	-.024	.033	-.046	.251	1.000	.083	.302	.099	.404	.015	.893
Q6	.654	.487	.151	.389	.083	1.000	.038	.494	-.037	.029	.077
Q7	-.053	.459	.310	.126	.302	.038	1.000	-.125	.192	-.003	.271
Q8	.698	.038	.014	.350	.099	.494	-.125	1.000	.110	-.051	.048
Q9	.003	-.022	.087	.104	.404	-.037	.192	.110	1.000	.156	.363
Q10	-.067	-.133	-.130	-.192	.015	.029	-.003	-.051	.156	1.000	.032
Q11	-.057	.022	-.088	.189	.893	.077	.271	.048	.363	.032	1.000

Inter-Item Covariance Matr

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Q1	.574	.058	.194	.168	-.013	.408	-.036	.411	.002	-.030	-.031
Q2	.058	.614	.088	.099	.019	.315	.327	.023	-.012	-.062	.012
Q3	.194	.088	.814	.113	-.031	.112	.254	.010	.055	-.070	-.057
Q4	.168	.099	.113	.547	.137	.237	.084	.201	.054	-.085	.099
Q5	-.013	.019	-.031	.137	.542	.050	.202	.057	.209	.007	.469
Q6	.408	.315	.112	.237	.050	.679	.029	.316	-.022	.014	.045
Q7	-.036	.327	.254	.084	.202	.029	.824	-.088	.122	-.002	.175
Q8	.411	.023	.010	.201	.057	.316	-.088	.604	.060	-.024	.026
Q9	.002	-.012	.055	.054	.209	-.022	.122	.060	.495	.065	.182
Q10	-.030	-.062	-.070	-.085	.007	.014	-.002	-.024	.065	.356	.014
Q11	-.031	.012	-.057	.099	.469	.045	.175	.026	.182	.014	.508

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	56.4032	24.704	.315	.736	.721
Q2	56.8548	23.995	.396	.627	.713
Q3	56.5806	23.559	.374	.616	.715
Q4	56.1452	24.028	.424	.478	.710
Q5	56.2097	24.234	.397	.826	.713
Q6	56.4839	23.237	.470	.743	.704
Q7	56.5968	22.999	.440	.511	.707
Q8	56.3387	25.047	.257	.670	.727
Q9	56.2742	25.481	.212	.313	.729
Q10	56.2419	27.990	.321	.357	.755
Q11	56.2581	24.719	.342	.807	.719

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
63.3871	24.651	4.25842	225

2. Variabel X2

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	225	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	225	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.827	.824	14

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	3.6613	.90433	225
Q2	3.9355	.84681	225
Q3	4.1613	.57811	225
Q4	3.6774	.71916	225
Q5	3.9355	.74374	225
Q6	3.8226	.87823	225
Q7	3.9839	.73534	225
Q8	4.2581	.57075	225
Q9	3.7581	.84321	225
Q10	3.7903	.81255	225
Q11	3.9032	.84368	225
Q12	3.9355	.78659	225
Q13	3.9355	.78659	225
Q14	3.8226	.84007	225

Inter-Item Correlation Matrix

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Q1	1.000	.463	.388	.308	.259	.604	.460	.299	.428	.638	.493	.522	.683	.632
Q2	.463	1.000	.423	.315	.488	.491	.656	.239	.644	.623	.404	.412	.412	.329
Q3	.388	.423	1.000	.285	.291	.283	.353	.567	.182	.387	.033	.384	.456	.364
Q4	.308	.315	.285	1.000	.206	.245	.393	.246	.302	.359	.218	.223	.223	.148
Q5	.259	.488	.291	.206	1.000	.233	.508	.194	.524	.438	.251	.413	.245	.165
Q6	.604	.491	.283	.245	.233	1.000	.529	.126	.517	.728	.574	.576	.482	.490
Q7	.460	.656	.353	.393	.508	.529	1.000	.323	.496	.653	.579	.452	.367	.287
Q8	.299	.239	.567	.246	.194	.126	.323	1.000	.064	.225	.019	.366	.257	.302
Q9	.428	.644	.182	.302	.524	.517	.496	.064	1.000	.619	.289	.594	.372	.355
Q10	.638	.623	.387	.359	.438	.728	.653	.225	.619	1.000	.472	.543	.389	.329
Q11	.493	.404	.033	.218	.251	.574	.579	.019	.289	.472	1.000	.361	.312	.253
Q12	.522	.412	.384	.223	.413	.576	.452	.366	.594	.543	.361	1.000	.311	.503
Q13	.683	.412	.456	.223	.245	.482	.367	.257	.372	.389	.312	.311	1.000	.528
Q14	.632	.329	.364	.148	.165	.490	.287	.302	.355	.329	.253	.503	.528	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Q1	.818	.355	.203	.200	.175	.480	.306	.154	.327	.469	.377	.371	.486	.480
Q2	.355	.717	.207	.192	.307	.365	.409	.115	.460	.429	.289	.274	.274	.234
Q3	.203	.207	.334	.118	.125	.144	.150	.187	.089	.182	.016	.175	.207	.177
Q4	.200	.192	.118	.517	.110	.155	.208	.101	.183	.210	.132	.126	.126	.089
Q5	.175	.307	.125	.110	.553	.152	.278	.082	.328	.265	.158	.242	.143	.103
Q6	.480	.365	.144	.155	.152	.771	.341	.063	.383	.520	.425	.398	.333	.361
Q7	.306	.409	.150	.208	.278	.341	.541	.135	.308	.390	.359	.261	.212	.177
Q8	.154	.115	.187	.101	.082	.063	.135	.326	.031	.104	.009	.164	.115	.145
Q9	.327	.460	.089	.183	.328	.383	.308	.031	.711	.424	.206	.394	.246	.251
Q10	.469	.429	.182	.210	.265	.520	.390	.104	.424	.660	.324	.347	.249	.224
Q11	.377	.289	.016	.132	.158	.425	.359	.009	.206	.324	.712	.240	.207	.179
Q12	.371	.274	.175	.126	.242	.398	.261	.164	.394	.347	.240	.619	.192	.333
Q13	.486	.274	.207	.126	.143	.333	.212	.115	.246	.249	.207	.192	.619	.349
Q14	.480	.234	.177	.089	.103	.361	.177	.145	.251	.224	.179	.333	.349	.706

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	70.5484	84.416	.769	.804	.919
Q2	70.2742	86.169	.707	.780	.921
Q3	70.0484	91.948	.516	.632	.925
Q4	70.5323	91.728	.418	.361	.927
Q5	70.2742	91.055	.451	.510	.927
Q6	70.3871	85.815	.702	.738	.921
Q7	70.2258	87.686	.710	.721	.921
Q8	69.9516	93.424	.365	.571	.927
Q9	70.4516	87.268	.636	.775	.923
Q10	70.4194	85.952	.756	.824	.920
Q11	70.3065	89.167	.510	.603	.926
Q12	70.2742	87.383	.680	.685	.922
Q13	70.2742	88.202	.622	.665	.923
Q14	70.3871	88.077	.585	.571	.924

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
72.2097	97.004	7.89972	14

3. Uji Valid Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	225	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	225	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.815	.811	13

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	3.8548	.74320	225
Q2	4.0645	.50800	225
Q3	3.3871	.99762	225
Q4	3.9677	.70053	225
Q5	4.0645	.53931	225
Q6	3.7903	.97740	225
Q7	3.8710	.83928	225
Q8	4.0000	.84930	225
Q9	4.0484	.49348	225
Q10	3.7742	.66331	225
Q11	3.7419	.80847	225
Q12	3.9516	.77729	225
Q13	3.7419	.80847	225

Inter-Item Correlation Matrix

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13
Q1	1.000	.069	.453	.337	.106	.115	.022	-.182	.019	.032	.182	-.058	-.036
Q2	.069	1.000	.015	.374	.044	.094	.058	.076	.118	-.053	.001	.257	.241
Q3	.453	.015	1.000	.206	.318	.337	.021	.116	.128	.060	.126	.062	.126
Q4	.337	.374	.206	1.000	-.038	.158	.132	.055	.431	-.016	.043	.107	.506
Q5	.106	.044	.318	-.038	1.000	.306	.200	.107	.173	.133	.227	.205	-.036
Q6	.115	.094	.337	.158	.306	1.000	.586	.553	.327	.406	.698	.682	.076
Q7	.022	.058	.021	.132	.200	.586	1.000	.736	.332	.418	.675	.786	.071
Q8	-.182	.076	.116	.055	.107	.553	.736	1.000	.156	.436	.501	.754	.119
Q9	.019	.118	.128	.431	.173	.327	.332	.156	1.000	.084	.278	.259	.155
Q10	.032	-.053	.060	-.016	.133	.406	.418	.436	.084	1.000	.440	.338	.073
Q11	.182	.001	.126	.043	.227	.698	.675	.501	.278	.440	1.000	.567	.047
Q12	-.058	.257	.062	.107	.205	.682	.786	.754	.259	.338	.567	1.000	.048
Q13	-.036	.241	.126	.506	-.036	.076	.071	.119	.155	.073	.047	.048	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13
Q1	.552	.026	.336	.176	.042	.084	.014	-.115	.007	.016	.109	-.035	-.022
Q2	.026	.258	.007	.133	.012	.047	.025	.033	.030	-.018	.001	.107	.099
Q3	.336	.007	.995	.144	.171	.328	.018	.098	.063	.040	.102	.051	.102
Q4	.176	.133	.144	.491	-.014	.108	.078	.033	.149	-.007	.024	.061	.287
Q5	.042	.012	.171	-.014	.291	.161	.090	.049	.046	.048	.099	.090	-.016
Q6	.084	.047	.328	.108	.161	.955	.481	.459	.158	.263	.552	.546	.060
Q7	.014	.025	.018	.078	.090	.481	.704	.525	.137	.233	.458	.540	.048
Q8	-.115	.033	.098	.033	.049	.459	.525	.721	.066	.246	.344	.525	.082
Q9	.007	.030	.063	.149	.046	.158	.137	.066	.244	.027	.111	.105	.062
Q10	.016	-.018	.040	-.007	.048	.263	.233	.246	.027	.440	.236	.184	.039
Q11	.109	.001	.102	.024	.099	.552	.458	.344	.111	.236	.654	.376	.031
Q12	-.035	.107	.051	.061	.090	.546	.540	.525	.105	.184	.376	.672	.032
Q13	-.022	.099	.102	.287	-.016	.060	.048	.082	.062	.039	.031	.032	.654

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	95.0161	57.000	.331	.	.831
Q2	94.8065	58.027	.385	.	.830
Q3	95.4839	54.746	.374	.	.831
Q4	94.9032	55.630	.492	.	.825
Q5	94.8065	58.290	.326	.	.831
Q6	95.0806	52.502	.551	.	.821
Q7	95.0000	53.967	.534	.	.822
Q8	94.8710	55.229	.421	.	.828
Q9	94.8226	57.722	.440	.	.828
Q10	95.0968	57.564	.324	.	.831
Q11	95.1290	55.327	.439	.	.827
Q12	95.0000	53.836	.562	.	.821
Q23	95.1290	57.491	.301	.	.835

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
91.8710	60.262	6.82699	13

Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		225
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.09913012
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.093
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.712
Asymp. Sig. (2-tailed)		.542

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

b. Heterokedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	1.538	5.345		.277	.622
	X1	-.059	.082	-.084	-.527	.511
	X2	.067	.033	.201	1.340	.132

a Dependent Variable: Y

c. Mutikol

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	36.044	8.647		3.284	.000		
	X1	.351	.121	.231	3.570	.006	.765	1.015
	X2	.541	.062	.671	7.077	.000	.765	1.015

a. Dependent Variable: Y

d. Uji Hipotesis

a. Uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2240.877	2	1043.444	30.006	.000(a)
	Residual	1466.065	52	25.875		
	Total	3626.968	63			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

b. Adjusted R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657(a)	.565	.532	4.18476

a Predictors: (Constant), X2, X1

c. Uji Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	35.047	7.645		3.245	.000
	X1	.352	.122	.234	1.765	.005
	X2	.539	.067	.643	7.077	.000

a Dependent Variable: Y